





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SUB UNIT KERJA : BIDANG MUTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LEGIMAN**

2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**

3. NHK : 216729

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 330.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 148.000.000

 MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

| | C. | HARTA BERGERAK LAINNYA | 16 | 1 | Rp. | 45.000.000 |
|-----------------------------------|----|------------------------|-------|-----|----------------------------|-------------|
| | D. | SURAT BERHARGA | N. C. | M | Rp. | K. K. |
| | E. | KAS DAN SETARA KAS | 41 | 41 | Rp. | 101.853.444 |
| P | F. | HARTA LAINNYA | K PI | KON | Rp. | KOK |
| | | Sub Total | | | Rp. | 624.853.444 |
| III. HUTANG | | | | Rp. | 100.000 <mark>.00</mark> 0 | |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | | | | Rp. | 524.853.444 | |
| | | | | | | |

Catatan:





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 6 Oktober 2020.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

